



# Sintang Hattrick WTP

**SINTANG-RK.** Setelah pada 2012 dan 2013, kembali pada 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalimantan.

Bupati Sintang, Milton Crosby mengungkapkan, di Kalbar, terdapat tujuh kabupaten/kota yang mendapat opini WTP. Sedangkan empat kabupaten mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). "Dari tujuh kabupaten yang mendapatkan opini WTP dari BPK-RI, Sintang termasuk di dalamnya," katanya saat ditemui di Pendopo Bupati Sintang, Minggu (5/7).

Milton mengatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tersebut disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan sek-

ter satu bulan lebih. "Mereka memeriksa laporan keuangan untuk menyakinkan bahwa laporan yang disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah," jelasnya.

Dia menjelaskan, salah satu unsur yang dinilai dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut, terkait pengawasan yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Inspektoral, selain memang ada pengawasan melekat pada setiap SKPD.

Sementara Bappeda mengorganisir perencanaan. Laporan keuangan diorganisir oleh BPKAD dan pelaksanaan ada pada seluruh SKPD," papar Milton.

Opini WTP yang diraih selama tiga tahun berturut-turut (hattrick) ini, kata Milton, harus diperlihatkan pada tahun-tahun berikutnya, meskipun sistem pelaporan keuangan sudah

berubah. "Saya berterima kasih kepada DPRD Kabupaten Sintang sebagai mitra Pemkab Sintang karena sudah mampu mendapatkan penilaian WTP. Ini hasil kerjasama yang baik dan inilah rapport kita," katanya.

Dia menjelaskan, opini BPK-RI ini merupakan pernyataan profesional yang dilihat berdasarkan empat kriteria, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Milton mengungkapkan, untuk pemeriksaan pada 2016 mendatang, BPK-RI sudah menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. "Untuk itu saya minta semua sektor di pemerintahan Sintang menyiapkan

diri dengan sistem pelaporan terbaru tersebut," katanya.

Kalau menemui kesulitan, tambah dia, jangan segan untuk bertanya langsung ke BPK-RI. "Ke depan, saya juga berharap kepada Bupati terpilih nantinya dapat menempatkan orang-orang yang handal dan profesional dalam mengelola laporan keuangan," pesannya.

Milton mengatakan, hingga saat ini, BPK-RI selalu menemukan seluruh kabupaten dan sistem pengendalian internal yang dibuktikan dengan kesalahan penganggaran. "Nah, maka dari itu harus ada orang yang tepat dan profesional dalam pengelolaan keuangan," katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Sintang, Jeffrey Edwrad mengapresiasi Pemkab Sintang atas report yang baik ini. Meskipun

demikian, masih ada yang perlu dibenahi, di antaranya persoalan aset.

"Saya minta semua pihak supaya siap dengan sistem pelaporan keuangan yang baru, yakni sistem pelaporan keuangan berbasis akrual. Karena saya melihat pertanggungjawaban keuangan akan lebih ketat," kata Jeffrey.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Sintang, Joni Sianturi mengaku siap dengan pemberlakuan sistem pelaporan berbasis akrual. "Siap tidak siap, kita harus hadapi. Kami sudah mempelajari sistem baru ini dan kami siap. Kita memang masih ada kendala dalam hal aset, tetapi kita terus bekerja keras mengatasi persoalan aset ini," tegasnya.

**Reporter: Achmad Munandar**  
**Editor: Mordjadi**